

Penyintas Kanker di Indonesia Masih Terhambat Biaya Pengobatan

Hal ini perlu menjadi prioritas dan fokus semua pihak.

JAKARTA(AM) - Kanker adalah penyakit tidak menular dengan angka insiden dan kematian yang tinggi dan terus meningkat setiap tahunnya sehingga perlu menjadi prioritas dan fokus semua pihak.

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah berhasil membuka akses bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia, termasuk penyintas kanker, untuk mendapatkan penanganan dan perawatan atas kondisi kesehatan yang dialami.

Saat ini, perkembangan teknologi pengobatan kanker terus memberikan peningkatan harapan dan kualitas hidup bagi penyintas kanker, namun di sisi lain Pemerintah mengalami keterbatasan pembiayaan untuk menambahkan berbagai pengobatan inovatif ke dalam cakupan JKN.

Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh The Swedish

Institute for Health Economics (IHE) di tahun 2021, ditemukan bahwa negara dengan alokasi pembiayaan kanker yang lebih tinggi menunjukkan keberhasilan penanganan kanker yang lebih baik dibandingkan negara yang memiliki alokasi pembiayaan kanker lebih rendah.

Oleh karena itu, Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH mengatakan jika pengimplementasian pembiayaan kesehatan yang inovatif dapat menjadi salah satu solusi pendanaan kesehatan.

Hal ini tentu memerlukan kolaborasi dengan berbagai pihak sehingga dapat membantu pemerintah untuk memperluas cakupan pengobatan untuk seluruh masyarakat.

Selain itu, lanjut dia dalam beberapa tahun terakhir, BPJS Kesehatan sebagai pengelola program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mengalami defisit sejak beberapa tahun

terakhir yang mendorong Pemerintah untuk mengurangi dan membatasi beberapa manfaat dalam cakupan JKN.

Pemerintah, tambah Prof Hasbullah seharusnya tidak hanya fokus mengurangi beban biaya dengan membatasi manfaat layanan pengobatan dalam program JKN, tapi juga perlu segera mencari ide-ide inovatif untuk meningkatkan alokasi pembiayaan sehingga pasien pasien.

Terutama bagi para penyintas kanker, agar bisa dapat memperoleh layanan terapi kanker yang paling optimal dan memberikan harapan hidup lima tahun lebih panjang serta kualitas hidup yang lebih baik.

Dr. Diah Ayu Puspandari, Apt. M.B.A. M.Kes, Ketua Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan (Pusat KPMAK) UGM, menjelaskan, untuk mengatasi masalah keterbatasan biaya kesehatan, Pemerintah perlu segera mencari solusi strategis, salah satunya dengan mengoptimalkan sumber-sumber dana yang ada untuk dialokasikan ke sektor kesehatan.

“Sebenarnya, Pemerintah sudah mulai menerapkan hal ini dengan mengalokasikan sebagian dari pajak rokok dan cukai tembakau yang diterima Pemerintah Daerah untuk sektor kesehatan. Namun, di tahun 2021, alokasi dana untuk sektor kesehatan tersebut turun dari 50% menjadi 25%,” ungkap dia.

Pihaknya berharap Pemerintah Pusat dapat merealokasi kembali aona untuk sektor kesehatan menjadi 50% atau memberikan fleksibilitas penggunaan dana pajak rokok dan cukai tembakau untuk pengembangan sektor kesehatan di tingkat daerah.

Selain itu, ia juga merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menyusun panduan teknis inovasi penggunaan pajak rokok dan cukai tembakau di sektor kesehatan, misal untuk optimalisasi pembelanjaan obat dan alat kesehatan termasuk obat inovatif kanker yang pada akhirnya akan mendatangkan manfaat bagi masyarakat yang kita layani.

drng. Puteh Sari, Anggota Komisi IX DPR RI menambah-

kan, Pemerintah perlu meninjau kembali tujuan awal Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yaitu untuk mencapai cakupan Kesehatan semesta. Hal ini bukan hanya berbicara tentang cakupan jumlah kepesertaan, tapi juga cakupan layanan yang diberikan.

Di antaranya yaitu dapat menjamin akses ke layanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang sama pentingnya, berkualitas dan efektif tanpa menimbulkan beban biaya individu.

Ia menambahkan bahwa pihaknya juga mendorong Pemerintah untuk menerapkan inovasi pembiayaan kesehatan sehingga perluasan terhadap akses pengobatan inovatif kanker tidak terbentur masalah keterbatasan biaya.

Salah satu inovasi pembiayaan yang dapat diujikaji dalam waktu dekat, lanjut drg. Putih adalah dengan membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan berbagai pihak, antara lain produsen obat dan asuransi swasta. ● tom

SAMBUNGAN

Di antaranya dengan memaksimalkan penggunaan minyak mentah domestik dan mengoptimalkan penggunaan gas alam untuk penghematan biaya energi. Selain itu, juga dilakukan peningkatan produksi kilang untuk produk yang bernilai tinggi.

Di samping itu, penyesuaian harga produk juga dilakukan secara selektif, hanya untuk BBM non-subsidi tertentu seperti Pertamina Series maupun Dex Series yang porsi konsumsinya hanya sekitar 15 persen dari total konsumsi BBM nasional.

Jenis BBM itu sebagian be-

sar dikonsumsi oleh kalangan konsumen mampu, pemilik kendaraan pribadi jenis menengah ke atas. Adapun ke depannya, harga produk BBM ini akan terus disesuaikan secara rutin mengikuti harga pasar sesuai ketentuan pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 62 Tahun 2017.

“Pertamina sangat berhati-hati dalam menetapkan harga. Namun kami yakin segmen konsumen ini telah merasakan manfaat BBM berkualitas yang lebih hemat dan lebih baik untuk perawatan mesin kendaraan, sehingga dapat menerima harga yang selama ini tetap sangat

kompetitif dibandingkan produk yang sejenis lainnya,” jelas Fajriyah.

Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatrawata mengatakan, konflik Rusia-Ukraina telah mempengaruhi kenaikan harga yang tinggi terhadap komoditas energi, salah satunya minyak mentah. Hal ini pun turut berpengaruh pada kondisi Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN).

Ia menjelaskan, secara keseluruhan, kenaikan harga komoditas termasuk Indonesia Crude Price (ICP), memang berdampak positif terhadap

pendapatan negara, terutama pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Namun demikian, kenaikan harga komoditas juga berdampak terhadap belanja negara.

“Terutama subsidi energi yang menjadikan ICP menjadi salah satu parameter utama dalam perhitungan,” katanya.

Pemerintah sendiri, lanjut Isa, akan terus memantau pergerakan harga minyak dunia dan mengukur dampaknya terhadap APBN. Pemerintah akan mengambil kebijakan yang diperlukan secara menyeluruh dengan melihat dari sisi potensi penerimaan

DARI HAL 1

Minyak Dunia Tembus 130 Dollar AS...

pengembalian kerugian 100 persen,” kata Tongam saat dihubungi wartawan, Rabu (9/3).

Menurutnya, besarnya pengembalian itu tergantung dari hasil putusan pengadilan kelak. “Pengembalian kerugian tersebut sangat tergantung pada putusan pengadilan,” ujar Tongam. Bahkan menurut Tongam, pengembalian kerugian kasus investasi ilegal atau bodong sulit dilakukan. Sebab harus diverifikasi dulu terkait data kerugian rill dari masing-masing investor. Dalam beberapa kasus, ia menuturkan, ada investor yang sudah pernah mendapatkan keuntungan atau bonus atas investasi yang mereka tanamkan. Namun, hal itu kemudian kerap tidak diakui mereka. “Perlu verifikasi data kerugian rill dari masing-masing investor, di mana sebagian investor bisa saja sudah pernah deposit uang atas bonus, tapi sering tidak diakui,” ucapnya. Seperti diketahui saat ini Bareskrim Polri tengah me-

nyidik beberapa kasus investasi bodong berkedok trading binary option, di antaranya Binomo dan Qoutex. Dalam penanganan kasus dugaan penipuan aplikasi Binomo, polisi telah menetapkan influencer Indra Kesuma alias Indra Kenz sebagai tersangka pada 24 Februari 2022 lalu.

Indra Kenz kini terancam hukuman 20 tahun penjara atas dugaan tindak pidana judi online dan/atau penyebaran berita bohong melalui media elektronik dan/atau penipuan, perbuatan curang dan/atau tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Ia disanggakan dengan Pasal 45 ayat 2 jo pasal 27 ayat 2 dan/atau Pasal 45 ayat 1 jo pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Kemudian, Pasal 3 dan/atau Pasal 5 dan/atau Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dan Pasal 378 KUHP

Jangan Mimpi Korban Investasi Ilegal...

bertujuan menghancurkan kemampuan militer Ukraina dan menghambat kalangan nasionalis berbahaya di Kiev.

Otoritas Rusia membantah menargetkan warga sipil dalam serangannya di Ukraina. Sementara media Rusia dan media internasional melaporkan situasi konflik dengan sangat berbeda. Kebanyakan warga Rusia mendapatkan kabar soal Ukraina dari me-

dia-media pro-Kremlin yang menyajikan interpretasi sangat berbeda soal apa yang terjadi sebenarnya.

Scherbak yang membagikan via media sosial soal situasi di Ukraina, menyatakan ini bukan pertama kalinya sang ibunda berusaha mempengaruhi opini politiknya.

“Dia selalu berusaha meyakinkan saya, untuk menyadarkan saya karena dia seorang ibu,

dan/atau penipuan, perbuatan curang dan/atau tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Ia disanggakan dengan Pasal 45 ayat 2 jo pasal 27 ayat 2 dan/atau Pasal 45 ayat 1 jo pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Kemudian, Pasal 3 dan/atau Pasal 5 dan/atau Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dan Pasal 378 KUHP

meloloskan undang-undang baru yang mengatur hukuman maksimum 15 tahun penjara bagi siapa saja yang secara sengaja menyebarkan berita ‘palsu’ soal militer Rusia.

Alex mengungkapkan bahwa orangtuanya menolepon dirinya setiap hari sejak perang terjadi, dan setiap panggilan telepon akan berujung pada pertengkaran antara dirinya dan ibunya. ● mar

membutuhkan bantuan dan dukungan,” ucapnya.

Sementara Alex (28) yang berprofesi sebagai game tester dan tinggal bersama istrinya di Gdansk, Polandia, menuturkan bahwa orangtuanya yang tinggal di Rusia terus memintanya menghapus postingan media sosial soal perang di Ukraina, karena bisa berbahaya bagi keselamatannya.

Pekan lalu, parlemen Rusia

Beda Pendapat Soal Invasi ke Ukraina...

semua bisa berjalan dan itu ya kita dukung,” kata Dasco saat ditemui di Kompleks DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu (9/3).

Sebelumnya santer dikabarkan bahwa pengumuman nama Kepala Badan Otorita akan dilakukan berbarengan dengan perombakan kabinet atau reshuffle, yang rencananya diumumkan pada akhir Maret 2022. “Sampai hari ini saya belum dapat informasi, tapi saya memang dengar ini kebutuhan yang mendesak,” katanya.

Sebelumnya, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Wendy Tutooing mengatakan, Kepala Badan Otorita

Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara kemungkinan akan dilantik pekan ini oleh Presiden Jokowi. Pelantikan kemungkinan dijadwalkan dalam sehati atau dua hari ke depan.

“Iya kemungkinan dalam satu atau dua hari ke depan. Tetapi saya belum dapat memastikan,” ujarnya saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (8/3).

Profil Singkat Bambang

Bambang Susantono merupakan alumni dari Fakultas Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung (ITB) 1987. Dia melanjutkan program pascasarjana di Universitas California, Berkeley untuk ge-

lar master tata kota dan wilayah dan lulus pada 1996. Kemudian pada 1998, Bambang meraih gelar MSCE di bidang teknik transportasi di universitas yang sama.

Kemudian pendidikan doktoralnya diselesaikan pada tahun 2000 dengan meraih gelar doktor di bidang perencanaan infrastruktur dari Universitas California, Berkeley. Setelah itu, Bambang dikenal sebagai pakar perencanaan infrastruktur dan transportasi.

Dia juga pernah menjabat sebagai Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah periode 2007-2010. Pada 2009 lalu dia diangkat sebagai Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) saat pemerintahan Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tugasnya yakni membantu Menteri Perhubungan dalam membenahi sektor transportasi di Indonesia. Kemudian Bambang menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Perhubungan setelah Menteri Perhubungan sebelumnya Evert Ernest Mangindaan mengundurkan diri karena terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019. Bapak dua anak ini pun telah menulis beberapa buku seputar infrastruktur dan transportasi. Salah satunya

adalah “Manajemen Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah” yang menjadi panduan dalam melakukan terobosan dalam rangka pembangunan nasional.

Buku lain yang pernah ditulisnya yakni “1001 Wajah Transportasi Kita”, “Strategi dalam Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah” dan “Memacu Infrastruktur di Tengah Krisis”.

Sejak 2015 lalu Bambang menjabat sebagai Wakil Presiden Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) dengan spesialisasi tugas urusan pengelolaan pengetahuan dan pembangunan berkelanjutan. ● mar

Hakim Itong Disebut Kerap Terima Uang...

Wahyono, dan Rachmat Harjono Tengadi.

Kemudian, Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, Joko Purnomo, serta dua pihak swasta Ahmad dan Made Sri Manggalawati, dikonfirmasi soal aliran uang untuk Itong Isnaini Hidayat.

“Seluruh saksi memenuhi panggilan tim penyidik dan didalam pengertiannya antara lain terkait dengan dugaan aliran sejumlah uang untuk setiap penanganan perkara yang sidangnya di pimpin oleh tersangka IIIH,”

kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Rabu (9/3).

KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan perkara yang sedang berproses di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Ketiga tersangka itu yakni, Hakim nonaktif PN Surabaya, Itong Isnaini Hidayat (IIIH). Kemudian Panitera Pengganti PN Surabaya, Hamdan (HD), serta Pengacara atau Kuasa PT Soyu Giri Primedika (PT SGP), Hendro

tersebut.

Hendro mewakili PT SGP diduga berupaya memenangkan perkara tersebut dengan cara menyuap pejabat Pengadilan Surabaya. Hendro berupaya menyuap Hakim Itong melalui Hamdan. PT SGP diwakili Hendro diduga telah menyiapkan uang Rp1,3 miliar untuk mengurus perkara ini mulai dari tingkat pengadilan hingga Mahkamah Agung.

Hendro telah menjalin komunikasi dengan Hamdan. Ada sejumlah imbalan yang

akan diberikan ke Hamdan dan Itong jika berhasil memenangkan perkara itu sesuai dengan keinginan PT SGP. Hamdan menyampaikan hal tersebut ke Itong. Itong bersedia dan sepakat asal ada imbalannya.

Hendro kemudian merealisasikan sejumlah uang Rp140 juta untuk Itong melalui Hamdan. KPK lantas mengamankan Hamdan dan Hendro sesaat setelah adanya penyerahan uang Rp140 juta yang diduga pelicin pengurusan perkara. ● mar

Pemerintah Optimistis Lebaran Tahun Ini Aman dari Ancaman Omicron BA.2

JAKARTA(AM) - Kementerian Kesehatan (Kemkes) optimis Lebaran tahun ini aman dari ancaman Covid-19 varian Omicron , khususnya Omicron BA.2 atau dikenal juga sebagai Son of Omicron.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemkes) Siti Nadia Tarmizi menjelaskan bahwa pemerintah akan terus memantau pergerakan varian Omicron BA.2 ini secara global.

“Kalau ditanya akan mengancam Lebaran 2022, kami perlu lihat lagi situasinya seperti apa nantinya,” jelas Siti Nadia saat konferensi pers virtual, Selasa (8/3).

Namun, melihat tren kasus dalam 2 minggu terakhir yang memperlihatkan penurunan kasus, Siti Nadia cukup optimis bahwa Omicron BA.2

tidak begitu mengancam.

“Kami cukup optimis bahwa selama 2 minggu belakangan ini, tren kasus konfirmasi terjadi penurunan, hanya beberapa provinsi di luar Jawa-Bali yang memperlihatkan peningkatan,” kata Siti Nadia.

Di sisi lain, Omicron BA.2 di Brunei Darussalam, Bangladesh, India, dan China cukup tinggi angka kejadiannya. Siti Nadia menyebut angka kasusnya lebih dari 50 persen. Meski kasusnya tinggi, menurut Siti Nadia, kenaikan kasusnya tidak signifikan seperti yang terjadi saat kemunculan Omicron di November 2021. Dengan kondisi tersebut, Omicron BA.2 masih bisa diminisialisir risikonya.

“Jadi, selama vaksinasi dosis lengkap plus booster dipercepat, kami berharap potensi BA.2 yang dikatakan lebih cepat menular 30 persen itu tidak akan menyebabkan lonjakan kasus,” tandasnya. ● tom

Vonis Edhy Prabowo Dipangkas...

Edhy Prabowo dengan penjara selama 5 tahun dan pidana denda sebesar Rp400 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan,” demikian penyiamar putusan dikutip dari dokumen yang diperoleh lewat Juru Bicara MA, Andi Samsan Nganro, Rabu (9/3).

Dalam dokumen tersebut, majelis hakim kasasi juga menghukum pencabutan hak politik Edhy selama dua tahun. Pencabutan hak politik tersebut diberlakukan atau terhitung sejak Edhy Prabowo selesai menjalani masa pidana pokok yakni lima tahun penjara.

Vonis di tingkat kasasi tersebut diputus oleh Ketua Majelis Hakim Sofyan Sitompul dengan hakim anggota masing-masing, Gazalba Saleh dan Sinitintha Yuliansih Sibarani. Putusan tersebut diketok pada Senin, 7 Maret 2022.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Kasasi menilai Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak mempertimbangkan bahwa Edhy telah bekerja baik selama menjadi Menteri

Kelautan dan Perikanan. Edhy, menurut majelis hakim kasasi, memberi harapan besar kepada masyarakat khususnya nelayan.

“Dalam hal ini terdakwa mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 56/PERMEN-KP/2016 tanggal 23 Desember 2016 dan menggantinya dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 12/PERMEN-KP/2020 dengan tujuan yaitu adanya semangat untuk memanfaatkan benih lobster untuk kesejahteraan masyarakat,” beberrnya.

Diketahui sebelumnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman Edhy Prabowo menjadi 9 tahun penjara ditambah denda Rp400 juta subsidier 6 bulan kurungan. Edhy juga diwajibkan membayar uang pengganti sejumlah Rp9.687.457.219 dan 77 ribu dolar AS subsidier 3 tahun penjara.

Putusan banding itu lebih berat dibanding vonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Di mana sebelumnya, Edhy Prabowo hanya dijatuhi hukuman 5 tahun penjara ditambah denda Rp400 juta subsidier 6 bulan kurungan. ● osm

Sindrom Air Mata Buaya...

Diwartakan Oddity Central, Zhang mulanya tidak terlalu memikirkan kejadian itu, tetapi lm kelamaan apa yang dialaminya mengganggu kehidupan sosialnya. Dia mulai menghindari makan di depan umum, karena orang-orang akan melihatnya berderai air mata di wajahnya ketika makan. Hal ini membuatnya menjadi tersosasi.

Namun suatu hari ia sadar, bahwa air matanya selalu membasahi wajahnya tiap kali makan, bukan sesuatu yang bisa dia sembunyikan selamanya. Ia pun memutuskan untuk menemui dokter.

Bulan lalu, Zhang pergi ke rumah sakit di Wuhan untuk pemeriksaan, dan didiagnosis dengan kondisi medis langka yang umumnya dikenal sebagai “sindrom air mata buaya”.

Dr Cheng Mian Chih, kepala Departemen Oftalmologi di rumah sakit tersebut menjelaskan bahwa kondisi tersebut erat kaitannya dengan kelumpuhan wajah pria tersebut sebelumnya.

Proses pemulihan dari kelumpuhan wajah telah mem-

engaruhi aktivitas kelentjar lakrimal, terutama yang ada di mata kirinya. Selama periode pemulihan, serabut saraf wajah menjadi salah arah, dan saraf saliva akhirnya menginervasi kelentjar lakrimal dan bukan kelentjar submandibular.

Hasil dari kesalahan arah saraf wajah ini adalah bahwa rangsangan seperti bau atau rasa makanan, alih-alih menyebabkan air liur, merangsang kelentjar lakrimal untuk menghasilkan air mata.

Gejala sindrom air mata buaya bervariasi dari pasien ke pasien, dan bisa diasah lebih ringan umumnya ditangani dengan konseling dan pemantauan rutin. Dalam kasus yang lebih parah, pengobatan yang paling populer adalah suntikan toksin botulinum ke kelentjar lakrimal, untuk menghentikan transmisi sepanjang seraf saraf yang diregenerasi secara menyimpang ke kelentjar yang terkena. Efek toksin bertahan sekitar 6 bulan.

Intervensi bedah juga merupakan solusi, dan itu adalah pilihan dalam kasus Zhang. Kondisinya meningkat pesat, tetapi sumber tidak menjelaskan apakah bantuan itu permanen. ● osm

InternationalMedia

PEMIMPIN REDAKSI: Osmar Siahaan
PELAKSANA HARIAN: Lusi J, Prayan Purbia.
PENANGGUNG JAWAB: Bambang Suryo Sularso.
KORDINATOR LIPUTAN/FOTO: Sukris Priatmo.
REDAKSI : Frans G, Vitus DP, Berman LR, Bambang Suryo Sularso.
ARTISITIK : M Rifki, James Donald, Indra Saputra.
SIRKULASI-PROMOSI : A Susanto, Nurbayin, Slamet, Ahyar, Ferry.
AGEN: JOGJA (Hidup Agency), PADANG (Karel Chandra), PALEMBANG (Angkasa), SOLO (ABC), BELITUNG (Naskafa Tjen).
PANGKAL PINANG (Yuliani, John Tanzi), **BALIK-PAPAN** dan **SAMARINDA** (Cv Gama Abadi, Alan/Tatang), **MAKASSAR** dan **MANADO** (Jefri/Meike, Jenny), **TARAKAN KALTIM** (Ali), **BALI** (Swasti), **PEKANBARU** (Bob), **LAMPUNG** (Kartika), **SURABAYA, MEDAN** dan **PONTIANAK**.
KUANGAN/IKLAN: Citta.
BIRO BOGOR : Subagiyo (Kepala Biro), Jaidarman.
BIRO TANGERANG: Johan (Kepala Biro).
BIRO BEKASI: Madong Lubis (Kabiro),
BIRO SEMARANG : Tri Untoro.
BIRO BANDUNG: Lyster Marpaung.
BIRO BANTEN : Drs H Izul Jazuli (Kepala Biro), Stefano (Koordinator Berita Serang, Pandeglang dan Lebak).
BIRO LEBAK: Nofi Agustina (Kabiro).
BIRO JAMBI : Ratumas Sabar Riah, Rts Zuchriah.
HARGA ECERAN : Rp 2.500./eks (di luar kota Rp 3.000./eks), Harga Langgan Rp 50.000./Bulan.
PERCETAKAN : PT. International Media Web Printing
ALAMAT: Jl. Kapuk Kamal Raya No. 40-A, Jakarta Barat. (isi di luar tanggung jawab percetakan).

Alamat Redaksi/Iklan : Gedung Guo Ji Ribao Lt 3 Jalan Gunung Sahari XI No. 291 Jakarta Pusat 10720
Telp : 021-6265566 pesawat 4000
Fax : 021-639 7652.
Twitter: InternationalMedia @redaksi_IM